



LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR



**TAHUN ANGGARAN
2021**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab..... 4

Laporan Realisasi Anggaran 5

Neraca 6

Laporan Operasional..... 7

Laporan Perubahan Ekuitas 8

Catatan Atas Laporan Keuangan 9

- BAB I Pendahuluan 9

 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9

 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 10

 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 14

- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja 16

 2.1 Ekonomi Makro 16

 2.2 Kebijakan Keuangan 16

 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD..... 16

- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan..... 18

 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 18

 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah
 Ditetapkan 20

- BAB IV Kebijakan Akuntansi 21

 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan..... 21

 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
 Daerah 22

 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 Pemerintah Daerah 24

 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam
 SAP Pada Pemerintah Daerah..... 24

-	BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	25
5.1	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	25
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	29
5.3	Penjelasan Laporan Operasional	47
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	57
-	BAB VI INFORMASI TAMBAHAN	58
	Lampiran – lampiran	62

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

EKO SUSANTO, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690701 199703 1 003

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2021;
- 4) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2021).

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 0,00 mencapai 0,00% dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 12.271.210.550,00 atau mencapai 98,39% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.139.219.040,30 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 7.094.200,00, investasi jangka panjang sebesar Rp0,00, aset tetap sebesar Rp 3.487.587.977,30, dana cadangan Rp 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp 644.536.863,00.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 72.489.173,00. yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 72.489.173,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.139.093.793,30.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 0,00, Beban dari kegiatan Operasional Rp 13.450.119.295,00 dan surplus/defisit sebesar Rp 206.085.623,00

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp 3.063.133.135,30, Surplus/Defisit Rp (13.450.119.295,00) dan Ekuitas akhir sebesar Rp 4.066.729.867,30.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 1/C);
31. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 9/A);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 3/A) ;
38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E);
39. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E);
40. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 61/A);

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai 12 (duabelas) program dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut (sesuai simda):

- a. Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah ;
- b. Program administrasi keuangan perangkat daerah ;
- c. Program administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- d. Program administrasi umum perangkat daerah;
- e. Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- f. Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- g. Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- h. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota;
- i. Program pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota;
- j. Program pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- k. Program penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota
- l. Program penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 secara keseluruhan sebesar Rp 14.612.542.545,00. yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan (sesuai di Laporan Simda)	0,00
2.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	12.595.946.081,00
3.	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	2.016.596.464,00
	Surplus/(Defisit)	(14.612.542.545,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 Nomor 2.10.01.01.00.00.4 tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp 3.968.877.486,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp 14.612.542.545,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	14.612.542.545,00	14.377.755.369,00	98,39
	- <i>Belanja Operasi</i>	12.595.946.081,00	12.383.456.669,00	98,31
	- <i>Belanja Modal</i>	2.016.596.464,00	1.994.298.700,00	98,89
	Total Belanja	(14.612.542.545,00)	(14.377.755.369,00)	98,39

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp 14.377.755.369,00 atau 98,39 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp 234.787.176 atau 1,61 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	998.500,00	99,85
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.900,00	318.000,00	99,71
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.779.209.000,00	2.642.551.383,00	95,08
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.600.000,00	33.600.000,00	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.850,00	491.425,00	98,31
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	204.500,00	200.000,00	97,79
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.570.000.000,00	2.522.579.490,00	98,15
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.197.690,00	10.848.000,00	96,87
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.170.311,00	37.384.000,00	97,93
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.200.000,00	64.189.000,00	99,98
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.586.850,00	27.493.750,00	99,66
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.731.000,00	26.729.235,00	99,99
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.204.830,00	261.635.000,00	97,18
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000,00	1.239.345,00	61,96
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.510.000,00	162.760.000,00	99,54
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.812.500,00	42.708.250,00	99,75
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.800.000,00	80.902.900,00	98,90
21	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	227.859.950,00	223.909.058,00	98,26
22	Pengelolaan Media Komunikasi	1.996.911.350,00	1.984.928.033,00	99,39

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
23	Publik Pelayanan Informasi Publik	80.114.200,00	79.409.447,00	99,12
24	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.905.230.750,00	4.894.301.558,00	99,77
24	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	538.495.114,00	537.126.250,00	99,74
26	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	44.991.000,00	38.485.149,00	85,53
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	454.820.500,00	452.214.850,00	99,42
28	Membangun Metadata Statistik Sektoral	143.399.000,00	143.247.996,00	99,89
29	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4.175.250,00	3.404.750,00	81,54
	Total	14.612.542.545,00	14.377.755.369,00	98,39

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Perbedaan persepsi dalam memasukan angka dari SIMDA ke CALK;
- b. Adanya angka yang tersembunyi yang tidak nampak pada karena ada di lembar SIMDA tertentu yang OPD belum paham;
- c. Aturan pengelolaan keuangan yang bersifat sangat dinamis;
- d. Rincian angka pada BA rekonsiliasi laporan keuangan daerah dan barang masih sulit dipahami untuk diterapkan pada format CALK;
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- f. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta pendapatan-lo dan beban.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar

nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

g. Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar serta Peraturan Bupati Blitar tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blitar.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 serta Realisasi Tahun Anggaran 2020, adalah NIHIL.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b. Belanja	14.377.755.369,00	12.271.210.550,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Operasi	12.383.456.669,00	12.194.123.950,00

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2021 Rp12.383.456.669,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Belanja Operasi			Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	
					2021	2020
(a)	Belanja Pegawai					
	1	Belanja Gaji Pokok		1.265.935.000,00	1.232.152.800,00	1.217.721.100,00
	2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		126.941.000,00	125.535.640,00	116.290.523,00
	3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		164.785.000,00	161.670.000,00	161.265.000,00
	4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		13.581.000,00	11.256.000,00	8.167.000,00
	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		23.389.000,00	21.620.000,00	22.380.000,00
	6	Belanja Tunjangan Beras PNS		76.847.000,00	75.389.220,00	63.005.400,00
	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		5.559.000,00	5.374.142,00	4.490.794,00
	8	Belanja Pembulatan Gaji PNS		20.000,00	19.147,00	22.092,00
	9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		90.524.000,00	86.602.833,00	52.716.457,00
	10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		2.578.000,00	2.483.755,00	0,00
	11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		7.734.000,00	7.451.305,00	0,00

	12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	958.665.000,00	880.400.969,00	870.396.717,00
	13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	42.651.000,00	32.595.572,00	0,00
	14	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.942.500,00	99.942.500,00	0,00
	15	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	17	Belanja Asuransi Ketenagakerjaan-LRA	0,00	0,00	10.088.068,00
(b)		Belanja Barang dan Jasa			
	1	Belanja Barang			
	-	Belanja Barang Pakai Habis	563.183.421,00	555.935.158,00	54.159.000,00
	2	Belanja Jasa			
	-	Belanja Jasa Kantor			
	-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55.900.000,00	49.200.000,00	6.300.000,00
	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.025.000,00	2.817.500,00	0,00
	-	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	1.200.000,00	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	125.000.000,00	124.350.000,00	2.550.000,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	467.400.000,00	465.500.000,00	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli	958.647.200,00	954.798.000,00	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000,00	22.800.000,00	27.000.000,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00
	-	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	89.839.060,00	89.740.000,00	0,00
	-	Belanja Tagihan Telepon	2.000.000,00	1.239.345,00	1.393.444,00
	-	Belanja Tagihan Listrik	5.000.000,00	0,00	1.550.500,00
	-	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	3.978.000,00
	-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.006.100.000,00	4.002.943.816,00	3.930.396.068,00
	-	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	0,00	135.882.000,00
	-	Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik	0,00	0,00	2.876.047.500,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Teknis	0,00	0,00	716.500.000,00
	-	Belanja Jasa Sewa Aplikasi Cloud-LRA	0,00	0,00	95.500.002,00
	3	Belanja Pemeliharaan			
	-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	85.000.000,00	83.944.250,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	300.100.000,00
	4	Belana Perjalanan Dinas			
	-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	207.003.900,00	204.475.817,00	160.787.435,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	185.120.000,00	184.593.500,00	127.131.600,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
	5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			
	-	Belanja Sewa Komputer Jaringan	204.000.000,00	198.000.000,00	0,00
	6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			
	-	Belanja Sewa Hotel	22.400.000,00	0,00	0,00
	7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
	-	Belanja Sosialisasi	1.972.410.000,00	1.964.807.500,00	0,00
	8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			

		-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	67.200.000,00	66.919.900,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.600.000,00	13.983.000,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.050.000,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.106.000,00	5.000.000,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	120.000.000,00	119.000.000,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	70.000.000,00	69.000.000,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	205.860.000,00	204.165.000,00	0,00
		-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
	9		Belanja hibah			
		-	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	496.741.800,00
	10		Belanja Honorarium PNS			
		-	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	90.025.000,00
		-	Belanja Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	40.500.000,00
	11		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	
		-	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	218.845.000,00
		-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	193.545.000,00
	12		Belanja Makanan dan Minuman			
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	54.442.000,00
		-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	0,00	1.250.000,00
	13		Belanja Cetak dan Penggandaan			
		-	Belanja Cetak	0,00	0,00	56.400.000,00
		-	Belanja Penggandaan	0,00		29.337.250,00
	14		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
		-	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	14.515.000,00
		-	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	19.582.000,00
		-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	7.593.000,00
		-	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	5.529.200,00
			Jumlah	12.595.946.081,00	12.383.456.669,00	12.194.123.950,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) Belanja Modal	1.994.298.700,00	77.086.600,00

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2021 Rp1.994.298.700,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Belanja Modal		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2021	2020
(a)	Belanja Modal Alat Kantor				
	1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.326.000,00	8.200.000,00	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
	1	Belanja Modal Alat Pendingin	11.524.000,00	11.400.000,00	
	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	20.062.744,00	19.950.000,00	19.950.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Studio				
	1	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	74.741.892,00	74.350.000,00	3.586.600,00
(d)	Belanja Modal Komputer Unit				
	1	Belanja Modal Personal Computer	364.858.128,00	356.640.000,00	0,00
	2	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	22.431.000,00	22.075.000,00	0,00
(e)	Belanja Modal Peralatan Komputer				
	1	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.064.382.700,00	1.055.226.800,00	0,00
	2	Belanja Modal Peralatan Jaringan	203.616.800,00	201.700.000,00	0,00
	3	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			
(f)	Belanja Modal rambu-rambu Lalu Lintang Darat				
	1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	200.000.000,00	198.206.900,00	0,00
(g)	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				
	1	Belanja Modal Goodwill	46.653.200,00	46.550.000,00	0,00
(h)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	3.750.000,00
(i)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	31.800.000,00
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	9.000.000,00
(j)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi				
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	9.000.000,00
Jumlah		2.016.596.464,00	1.994.298.700,00	77.086.600,00	

Jumlah tersebut termasuk:

- Anggaran dan realisasi 2021 tentang Belanja Modal termasuk Belanja Modal Aset tak berwujud (Belanja Modal Goodwill) sebesar Rp 46.653.200,00

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Aset	4.139.219.040,30	3.135.504.032,30

Saldo Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.139.219.040,30 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(1)	Aset Lancar	7.094.200,00	9.597.500,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	3.487.587.977,30	2.481.369.669,30
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	644.536.863,00	644.536.863,00
Jumlah Aset		4.139.219.040,30	3.135.504.032,30

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Lancar	7.094.200,00	9.597.500,00

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar 7.094.200,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
(b)	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
(c)	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
(d)	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
(e)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
(f)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
(g)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
(h)	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
(i)	Piutang Lainnya	0,00	0,00
(j)	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
(k)	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
(l)	Persediaan	7.094.200,00	9.597.500,00
(m)	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
(n)	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00

Jumlah	7.094.200,00	9.597.500,00
---------------	---------------------	---------------------

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari ... dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis	Nilai (Rp)
(a)	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0,00
-	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
-	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00
-	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
-	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00
-	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
-	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	0,00
(b)	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00
-	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
-	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	0,00
-	Piutang Retribusi Terminal	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00
-	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
-	Piutang Retribusi Penyeberangan di Air	0,00
-	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00

(c)	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00
-	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00
-	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00
JUMLAH		0,00

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)

(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00
------------------------------	-------------	-------------

Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
2		0,00
3		0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
7.094.200,00	9.597.500,00

(d) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.094.200,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
1	Persediaan Alat Tulis kantor			2.871.800,00
	Kertas fax	2 buah	25.000	50.000,00
	Ballpoint	1 Pak	44.000,00	44.000,00
	Binder Clip (Kenko 117)	1 Dos	6.300,00	6.300,00
	Binder Clip (Joyko 105)	1 Dos	5.500,00	5.500,00
	Binder Clip (Kenko 200)	2 Dos	16.000,00	32.000,00
	Buku Folio	3 Buah	35.000,00	105.000,00
	Buku Kwitansi	3 Buah		30.000,00

			10.000,00	
	Correction Fluid	3 Buah	14.000,00	42.000,00
	Dokument Keeper	3 Buah	55.000,00	165.000,00
	Isi Ballpoint Pentel	1 Buah	30.000,00	30.000,00
	Isi Ballpoint Parker	2 Buah	28.000,00	56.000,00
	Kertas HVS 60 gr	10 Rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS 70 gr	12 Rim	65.000,00	780.000,00
	Kertas A4 70 gr	2 Rim	58.000,00	116.000,00
	Kertas HVS Warna 70 gr	2 Rim	75.000,00	150.000,00
	Map Plastik	2 Buah	16.000,00	32.000,00
	Map Biasa	8 Buah	2.000,00	16.000,00
	Map Batik	50 Buah	5.900,00	295.000,00
	Tinta Printer	5 Botol	65.000,00	325.000,00
	Tinta Stempel	1 Botol	32.000,00	32.000,00
2	Persediaan Perangko, Materei dan Benda Pos lainnya			-
	Persediaan Materai 10000	0 Lembar	10.000,00	-
3	Persediaan Alat Kebersihan			1.287.500,00
	Sapu Ijuk Lantai 2 Macam	6 Buah	47.000	282.000,00
	Sapu Langit-Langit Lion Star, Livina	2 Buah	138.500	277.000,00
	Keset Handuk HSH, 40x60cm	3 Lembar	46.000	138.000,00
	Kain Lap Kuning Uk Besar	2 Lembar	19.000	38.000,00
	Keranjang Sampah Elite Kecil	2 Unit	48.500	97.000,00
	Cairan Pencuci piring 400 ml	2 Buah	11.500	23.000,00
	Karbol Supersol 450 ml	2 Botol	21.500	43.000,00
	Pembersih Kaca Clear botol 410 ml	3 Botol	11.500	34.500,00
	Pembersih kayu lemon Pledge350 gr	5 Botol	47.000	235.000,00
	Kamper 500 gr	2 Per Bungkus	60.000	120.000,00
4	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)			1.106.000,00
	Battery tanggung	4 buah	10.000,00	40.000,00
	Lampu Neon	1 buah	25.000	25.000,00
	Batteray A3	3 Set	28.000	84.000,00

	Batteray A2	3 Set	28.000	84.000,00
	Lampu LED 30 Watt	4 Buah	130.000	520.000,00
	Lampu LED 12 Watt	3 Buah	65.000	195.000,00
	Lampu LED 5 Watt	2 Buah	35.000	70.000,00
	Lampu TL 20 Watt	2 Buah	44.000	88.000,00
5	Persediaan Barang Cetak			1.828.900,00
	Amplop dinas cassing rahasia	1800 buah	450,00	810.000,00
	Amplop Dinas	8 Lembar	800	6.400
	Blangko SPM	25 Lembar	2.500	62.500
	Kertas Foto;	2 Box	100.000	200.000
	Stop Map Dians	100 Lembar	7.500	750.000
	Jumlah			7.094.200,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD - hilang item yang tidak ada)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitarper 31 Desember 2021 sebesar nihil.		

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Aset Tetap	3.491.930.620	2.481.369.669,30
Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.491.930.620 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	8.982.565.024,30	6.855.819.661,30
(c)	Gedung dan Bangunan	389.902.967,00	205.570.467,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(5.880.537.459,00)	(4.580.020.459,00)
Jumlah Aset		3.491.930.620,30	2.481.369.669,30

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2021 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2020 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(a) Tanah	0,00	0,00

Saldo Tanah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2021

Koreksi tambah asset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	

-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang asset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(b) Peralatan dan Mesin	8.982.565.024,30	6.855.819.661,30

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.982.565.024,30 dengan perincian sebagai berikut.Rincian dapat dilihat pada (*lampiran mutasi asset tetap 2021*)

Saldo Awal Per 1 Januari 2021	6.855.819.661,30
--------------------------------------	-------------------------

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi	2.196.253.700,00	
Reklasifikasi		
Koreksi		
Ekstrakomptabel	1.410.000,00	+
Jumlah penambahan		2.197.663.700,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	(60.000.000,00.)
-------------	------------------

Mutasi	(69.508.337,00)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	
Ekstrakomptabel	(2.820.000,00) +	
Jumlah Pengurangan		(132.328.337) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		8.982.565.024,30

Koreksi tambah asset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-	 +	
Total Koreksi Tambah		(.....)

Koreksi kurang asset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	389,902,967.00	205.570.467,00

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 389,902,967.00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021	205.570.467,00
--------------------------------------	-----------------------

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi	215.691.200,00	
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan	215.691.200,00	
Pengurangan Gedung dan Bangunan		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	
Migrasi	(31.105.000,00)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		389,902,967.00

Koreksi tambah asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)
---	---------

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2021

Koreksi tambah asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.....

dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		(.....)

Koreksi kurang asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.....
dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	644.536.863,00	644.536.863,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 644.536.863,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021 **644.536.863,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+

Jumlah penambahan		
Pengurangan Aset Tetap Lainnya		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		644.536.863,00

Koreksi tambah asset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-	 +	
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang asset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
---------------------------------	------	------

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 *(jika ada/ jika tida ada ditulis nihil)* sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	Nomor Kontrak	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Misal:Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi		0,00	0,00
2				
	JUMLAH		0,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(g) Akumulasi Penyusutan	(5.880.537.371,30)	(4.580.020.459,00)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp (5.884.880.014,00) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Peralatan Dan Mesin	5,727,737,877.30	4,695,422,845.30
3	Gedung dan Bangunan	152,799,494.00	145,035,320.00
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
	JUMLAH	(4,840,458,165.30)	(4.580.020.459,00)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 2021 4,840,458,165.30

Penambahan Akumulasi penyusutan

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.032.315.032,00	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.882.090,00	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		+
	1.040.079.206,00	
Reklasifikasi		
Koreksi		 +
Jumlah penambahan		1.040.079.206,00

Pengurangan Akumulasi penyusutan

Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan	(.....)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	5.880.537.371,30.	

Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang	(.....)	

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00(jika ada/ jika tida ada ditulis nihil).		
	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	644.536.863,00	644.536.863,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 644.536.863,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 644.536.863,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	644.536.863,00	644.536.863,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
Jumlah Aset		644.536.863,00	644.536.863,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar 1.003.715.008,30 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2021 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2020 (Rp 4.139.219.040,30 – Rp 3.135.504.032,30) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	644.536.863,00	644.536.863,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp 644.536.863,00 merupakan Software/Perangkat Lunak dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021		644.536.863,00
Penambahan Aset Tak Berwujud		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	 +	
Jumlah penambahan		
Pengurangan Aset Tak Berwujud		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		644.536.863,00

Koreksi tambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	

-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		<u>.....</u>

Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		<u>(.....)</u>

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 *(jika ada/ jika tida ada ditulis nihil)*sebesar Rp0,00, terdiri dari (Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp0,00), dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2021

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	+	
Jumlah penambahan	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan	(.....)
-------------	---------

Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		

Koreksi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2021 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari

kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	Misal:Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b. Kewajiban	72.489.173,00	72.370.897,00

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 72.489.173,00 dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	72.489.173,00	72.370.897,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 72.370.897,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 72.489.173,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang Belanja	72.489.173,00
(b)		0,00
(c)		0,00
Jumlah Hutang		72.489.173,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas	3.139.093.793,30	3.063.133.135,30

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp 3.139.093.793,30.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2021 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit Operasional.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Pendapatan LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar NIHIL.

No	Pendapatan Daerah	2021 (Rp)	2020(Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
	- Pendapatan Pajak - LO		
	- Pendapatan Retribusi - LO		
	-		
(2)	Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		
	-.....		
(3)	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Hibah - LO		
	-.....		
Jumlah		0,00	0,00

Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO yaitu sebesar Rp..... (Rp... - Rp...), perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan – LRA Rp.

Penambahan:

1. Piutang Murni (2021) Rp
2. Pendapatan Hibah – LO Rp
3. Koreksi Kurang Catat Rp
- Pendapatan - LO

Jumlah Penambahan Rp.

Pengurangan:

4. Setoran Piutang tahun
sebelumnya (Rp)
5. Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
6. Koreksi Lebih Catat
Pendapatan - LO (Rp)

Jumlah Pengurangan (Rp.)

Pendapatan - LO Rp.

1. Piutang Murni (2021) sebesar Rp terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.
- b. Pendapatan Retribusi Daerah Rp.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.
- d. Lain-lain PAD Yang Sah Rp.
- JUMLAH Rp.

2. Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp Terdiri dari:

- a. Rp.
- b. Rp.
- c. Rp.
- d. Rp.
- JUMLAH Rp.

3. Koreksi Kurang Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... Terdiri dari:

- a. Rp.
- b. Rp.
- c. Rp.
- d. Rp.
- JUMLAH Rp.

4. Setoran Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp..... Terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.
- b. Pendapatan Retribusi Daerah Rp.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.
- d. Lain-lain PAD Yang Sah Rp.
- JUMLAH Rp.

5. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp..... terdiri dari:

- a. Sewa Gedung Serba Guna Rp.
- b. Sewa Tanah dan Bangunan Rp.
- JUMLAH Rp.

6. Koreksi Lebih Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... terdiri dari:

- a. Rp.
- b. Rp.

c.	Rp.
d.	Rp.
JUMLAH	Rp.

(kalau tidak ada tidak dicantumkan)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b. Beban	13.450.119.295,00	13.244.033.672,00

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 13.244.033.672,00 lebih besar Rp 206.085.623,00 atau 1,56% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 13.244.033.672,00,dengan rincian sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.748.293.883,00 lebih besar Rp. 221.750.732 atau 8,77% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.526.543.151,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Pegawai - LO	Saldo (Tahun 2021)	Saldo (Tahun 2020)
1	Belanja Gaji Pokok	1.232.152.800,00	1.217.721.100,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	125.535.640,00	116.290.523,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	161.670.000,00	161.265.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.256.000,00	8.167.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.620.000,00	22.380.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.389.220,00	63.005.400,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.374.142,00	4.490.794,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.147,00	22.092,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	86.602.833,00	52.716.457,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.483.755,00	0,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.451.305,00	0,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	880.400.969,00	870.396.717,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	32.595.572,00	0,00
14	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.942.500,00	0,00
15	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	0,00
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	0,00
17	Belanja Asuransi Ketenagakerjaan-LRA	0,00	10.088.068,00
Jumlah Total		2.748.293.883,00	2.526.543.151,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp.... Tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp... sehingga terdapat selisih sebesar Rp..... Selisih tersebut merupakan

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.635.162.786,00 lebih kecil Rp 32.418 atau 0,33% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 9.667.580.799,00.dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

NO	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO		Saldo	Saldo
			(Tahun 2021)	(Tahun 2020)
	1	Belanja Barang	0	0,00
		- Belanja Barang Pakai Habis	555.935.158,00	54.159.000,00
	2	Belanja Jasa	0	0,00
		- Belanja Jasa Kantor		
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.200.000,00	6.300.000,00
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.817.500,00	0,00
		- Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	0,00
		- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	124.350.000,00	2.550.000,00
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	465.500.000,00	0,00
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli	954.798.000,00	0,00
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000,00	27.000.000,00
		- Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000,00	0,00
		- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	213.000.000,00	0,00
		- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	89.740.000,00	0,00
		- Belanja Tagihan Telepon	1.239.345,00	1.393.444,00
		- Belanja Tagihan Listrik	0,00	1.550.500,00
		- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	3.978.000,00
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.002.943.816,00	3.930.396.068,00
		- Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	135.882.000,00
		- Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik	0,00	2.876.047.500,00
		- Belanja Jasa Tenaga Teknis	0,00	716.500.000,00
		- Belanja Jasa Sewa Aplikasi Cloud-LRA	0,00	95.500.002,00
	3	Belanja Pemeliharaan	0	0
		- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	83.944.250,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	300.100.000,00
	4	Belana Perjalanan Dinas	0	0
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	204.475.817,00	160.787.435,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	184.593.500,00	127.131.600,00
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000,00	0,00
	5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
		- Belanja Sewa Komputer Jaringan	198.000.000,00	0,00
	6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
		- Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00
	7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
		- Belanja Sosialisasi	1.964.807.500,00	0,00
	8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	66.919.900,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.983.000,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	6.050.000,00	0,00

		Rumah Tangga-Alat Pendingin		
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	119.000.000,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	69.000.000,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	204.165.000,00	0,00
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	0,00
	9	Belanja hibah		
		- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	496.741.800,00
	10	Belanja Honorarium PNS		
		- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	90.025.000,00
		- Belanja Honorarium PNS Lainnya	0,00	40.500.000,00
	11	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
		- Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	218.845.000,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	193.545.000,00
	12	Belanja Makanan dan Minuman		
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	54.442.000,00
		- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	1.250.000,00
	13	Belanja Cetak dan Penggandaan		
		- Belanja Cetak	0,00	56.400.000,00
		- Belanja Penggandaan		29.337.250,00
	14	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
		- Belanja Jasa Service	0,00	14.515.000,00
		- Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	19.582.000,00
		- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	7.593.000,00
		- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	5.529.200,00
		Jumlah Total	9.635.162.786,00	9.667.580.799,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 9.684.215.695,00 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp 9.635.162.786,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 49.052.909,00 (Rp 9.684.215.695,00 – Rp 9.635.162.786,00). Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp 49.052.909,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa – LRA Rp 9.635.162.786,00

Penambahan

- 1 Beban dari Persediaan Awal (1 Januari 2021) Barang dan Jasa Rp 9.597.500,00
- 2 Utang Beban Barang Jasa Rp. 109.047,00
- 3 Beban Barang Jasa dari Belanja Modal Rp. 46.550.000,00

Jumlah Penambahan Rp 56.256.547,00

Pengurangan

- 4 Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2021) Barang dan Jasa Rp(7.094.200,00.)
- 5 Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2021 Rp (109.438,00.)

Jumlah Pengurangan Rp(7.203.638,00)

Beban Barang dan Jasa – LO Rp. 9.684.215.695,00

1. Beban dari Persediaan Awal sebesar Rp. 9.597.500,00 berasal dari:
- a. Beban Alat Tulis Kantor Rp 2.830.000,00
 - b. Beban Bahan Cetak dan Penggandaan Rp 2.522.500,00
 - c. Beban Alat Listrik Rp 2.495.000,00
 - d. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya Rp 1.750.000,00
- JUMLAH** Rp 9.597.500,00
2. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 109.047,00. merupakan kewajiban yang timbul pada bulan Desember 2020 dan masih harus dibayar pada bulan Januari 2021 yang nantinya akan berpengaruh pada Beban Jasa Kantor diantaranya:

- a. Utang Beban Telepon Rp 109.047,00
- JUMLAH** Rp 109.047,00

3. Sedangkan Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp 46.550.000,00. dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Khusus Rp 46.550.000,00
- JUMLAH** Rp 46.550.000,00.

4. Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp..... merupakan beban sewa rumah jabatan/ dinas yang ada pada Bagian Umum dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka		
Uraian	Saldo (Rp)	Berakhir
a)		
b)		

5. Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah sebesar Rp..... dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Hibah Obat-obatan Rp
 - b. Hibah Kendaraan Bermotor Rp

c. dst	Rp
JUMLAH	Rp

6. Koreksi kurang catat utang beban barang dan jasa sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

a. Utang Beban Telepon	
- Data Utang Beban Telepon awal	Rp
- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (.....)
Kurang Catat Saldo Awal Beban Telepon	_____ Rp
b. Utang Beban Air	
- Data Utang Beban Air Awal	Rp
- Pembayaran Utang Beban Air	Rp (.....)
Kurang Catat Saldo Awal Beban Air	_____ Rp
JUMLAH	Rp

7. Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2021) Barang dan Jasa sebesar Rp 7.094.200,00. dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Alat Tulis Kantor	Rp 2.871.800,00
b. Beban Bahan Cetak dan Penggandaan	Rp 1.828.900,00
c. Beban Alat Listrik	Rp 1.106.000,00
d. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 1.287.500,00
Jumlah	Rp 7.094.200,00

8. Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2020 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

a. Utang Beban Telepon	Rp
b. Utang Beban Air	Rp
c. Utang Beban Listrik	Rp
d. Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
e. Utang Beban Faximili, Internet	Rp
f. Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g. Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
JUMLAH	Rp

9. Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp..... dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Barang Pakai Habis	Rp
- Beban Bahan	Rp
- dst	Rp
b. Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp
- Beban Komponen	Rp
- dst	Rp
c. Beban Barang Bekas Dipakai	Rp

- dst	Rp
JUMLAH	Rp

10.Koreksi Lebih Catat pembebanan Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp..... antara lain terdiri dari:

a.	Utang Beban Telepon		
	- Data Utang Beban Telepon awal	Rp	
	- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (.....)	
	Lebih Catat Saldo Awal Beban Telepon		Rp
b.	Utang Beban Air		
	- Data Utang Beban Air Awal	Rp	
	- Pembayaran Utang Beban Air	Rp (.....)	
	Lebih Catat Saldo Awal Beban Air		Rp
	JUMLAH		Rp

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut.

Tabel			
No.	Rincian Beban Hibah - LO	Saldo (Tahun 2021)	Saldo (Tahun 2020)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.	Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
4.	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00
5.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00
6.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00
7.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut.

Tabel			
No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Saldo (Tahun 2021)	Saldo (Tahun 2020)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	0,00

2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	0,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Tahun 2021)	Saldo (Tahun 2020)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	0,00	0,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
7.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

6) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp..... lebih besar Rp..... atau% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Saldo (Tahun 2021)	Saldo (Tahun 2020)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
2.	Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

7) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2021, sedangkan belanja modal tahun 2021 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2021.

Saldo beban penyusutan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.017.491.050,00 lebih kecil Rp 55.386.219,00 atau 5% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 1.072.877.269,00dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2021)	Saldo (Tahun 2020)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		

	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.657.142,00	26.637.083,00
	- Beban Penyusutan Rumah Tangga	184.839.620,00	170.524.150,00
	- Beban Penyusutan Alat Kantor	130.763.807,00	89.374.300,00
	- Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.728.750,00	10.728.750,00
	- Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	61.699.730,00	92.138.126,00
	- Beban Penyusutan Komputer Unit dan Peralatan Komputer	607.642.526,00	665.153.370,00
	- Beban Penyusutan Rambu-Rambu	9.395.301,00	14.832.081,00
2.	<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>		
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung	7.764.174,00	3.489.309,00
Jumlah Total		1.017.491.050,00	1.072.877.269,00

- c. **Surplus/Defisit dari Operasi**
 Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp (13.450.119.295,00) lebih besar Rp (206.085.623,00) atau 1,56% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp . (13.244.033.672,00).
- d. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**
 Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2021 sebesar Rp0,00 merupakan sedangkan saldo tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan
- e. **Surplus/Defisit - LO**
 Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp (13.450.119.295,00) sedangkan saldo tahun 2020 sebesar Rp 13.244.033.672,00.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Saldo Ekuitas Awal	3.063.133.135,30	4.068.692.611,14
2.	Surplus/defisit – LO	(13.450.119.295,00)	(13.244.033.672,00)
3.	Koreksi Ekuitas	75.960.658,00	(32.736.353.84)
4.	Ekuitas akhir	4.066.729.867,30	12.271.210.550,00

Koreksi Ekuitas sebesar Rp 75.960.658,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Tambah Ekuitas :

- Mutasi Aset Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung LPPL Persada)	81.507.187,00	
Total Koreksi Tambah		81.507.187,00

Koreksi Kurang Ekuitas :

- Mutasi Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) kec Selopuro	(5.546.529,00)	
Total Koreksi Kurang		(5.546.529,00) +
Total Koreksi Ekuitas		75.960.658,00

BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN

Selama tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika terjadi hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan ini, sebagai berikut:

- 1. Penggantian personil pada SKPD selama tahun berjalan ;
- 2. Perubahan anggaran selama tahun berjalan karena adanya permintaan dari pimpinan daerah dan atau ada barang jasa yang rusak karena kecelakaan kerja;
- 3. Perubahan / pergerakan barang / aset yang berbeda antara berita rekon dan di simda barang;
- 4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan (SOTK Baru); dan
- 5. Penjelasan tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD untuk Penanganan COVID-19

a. Pendahuluan

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menganggarkan Belanja untuk Penanganan COVID-19 pada sub kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021. Dalam peraturan tersebut (ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menginstruksikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan di bidang ekonomi, bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Untuk itu, perlu dijelaskan dalam Laporan Keuangan **SKPD** tentang realisasi APBD untuk penanganan COVID-19.

b. Penjelasan Realisasi APBD untuk Penanganan COVID-19

APBD untuk penanganan COVID-19 yang telah diterima oleh **SKPD.....** sebesar **Rp.....** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
I. Bidang Kesehatan				
A.	Penanganan COVID-19			
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (DBHCHT RS Srengat)			
2	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT RS Srengat)			
3	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT RS Ngudi Waluyo Wlingi)			
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DBHCHT Dinkes)			
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT Dinkes)			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
7	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (KEBUTUHAN RUMAH ISOLASI)			
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
9	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
11	Belanja Tidak Terduga			
12	BMHP dan Obat RSUD Srengat			
13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan			
14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik			
15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
16	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
17	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
18	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
19	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Subtotal			
B. Dukungan Vaksinasi				
1	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi			
2	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi			
3	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin			
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi			
	Subtotal			
C. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19				
1	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			
	Subtotal			
D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19				
	a. Dokter Spesialis			
	b. Dokter umum dan dokter gigi			
	c. Bidan dan perawat			
	d. Tenaga kesehatan lainnya			
	Subtotal			
E. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas				
1	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)			
	Subtotal			
	Total Bidang Kesehatan			
II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi				
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	Subsidi pertanian			
3	Pembangunan Prasarana Pertanian			
4	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
5	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
8	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
9	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
10	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
11	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
13	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
	Daerah Kabupaten/Kota			
14	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
15	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
17	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
18	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
19	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
20	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
21	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
22	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
23	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
24	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Total Penanganan Dampak Ekonomi			
III.	Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial			
1	Pemberian makanan tambahan pada LKSA			
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
4	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Total Bantuan Sosial			
	Total I + II + III			

**diisi sesuai dengan sub kegiatan yang ada di masing-masing SKPD*

Blitar, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blitar

EKO SUSANTO, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690701 199703 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri Fotocopy Rekening Koran per 31 Desember 2021
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan beserta Lampirannya
3. Daftar Inventarisasi Piutang Daerah per 31 Desember 2021
4. Daftar Inventarisasi Aset Perolehan per 31 Desember 2021 dilampiri KIB Perolehan tahun 2021 dari Simda BMD (Laporan Penatausahaan-KIB/KIR-Laporan KIB A/B/C/D-Pilih 2021)
5. Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021
6. Daftar Utang Beban yang Belum Dibayar s.d 31 Desember 2021
7. Daftar Beban Sewa Dibayar Dimuka s.d 31 Desember 2021
8. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka s.d 31 Desember 2021
9. Daftar Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga per 31 Desember 2021
10. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan s.d 31 Desember 2021
11. Daftar Hibah Barang (Aset) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2021 → di luar Penanganan Covid-19
12. Daftar Hibah Barang (Persediaan) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2021 → di luar Penanganan Covid-19
13. Rincian Barang ke Neraca dari Simda BMD (Laporan-Akuntansi-Rincian Barang ke Neraca)
14. Rekap Perhitungan Penyusutan per 31 Desember 2021 (dari Bidang Aset)
15. Berita Acara Rekonsiliasi LRA Semester II TA 2021 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)
16. Berita Acara Rekonsiliasi BMD Semester II TA 2021 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)